

**ANALISIS IMPLEMENTASI KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN
PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH**

SKRIPSI



ASLAM ASY'ARI
NIM : 105731116316

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN
PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

ASLAM ASY'ARI
NIM : 105731116316

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomidan
Bisnis pada Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

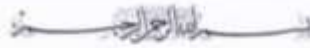
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : "Analisis Implementasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah"

Nama Mahasiswa : Aslam asy'ari

No. Stambuk/ NIM : 105731116316

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan serta dipertahankan di hadapan penguji pada *Ujian Skripsi* yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Via Zoom

Makassar, 23 Mei 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Andi Jam'an, SE, M.Si
NIDN. 0902116603

Mutiarni, SE, M.Si
NIDN. 0930087503

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H. Andi Jam'an, SE, M.Si
NBM. 651 50

Mira SE, M.Ak.Ak
NBM. 1286 844



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: **Aslam asy'ari**, NIM: **105731116316** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: /1444H/2023M, Pada tanggal 02 Dzulqad'ah 1444 H/ 22 Mei 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Dzulqad'ah 1444 H

22 Mei 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, M. Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'ah, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Amri, SE., M.Ak., CA
 2. Andi Arman, SE., M.Si., AK., CA
 3. Mira, SE., M.Ak.Ak
 4. Masrullah, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'ah, SE., M.Si
NBM : 651507



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Nama : **Aslam asy'ari**
Stambuk : 105731116316
Jurusan : **Akuntansi**
Dengan Judul : Analisis Implementasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skrripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 02 Dzulqa'dah 1444 H
22 Mei 2023 M

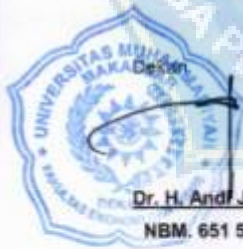
Yang Membuat Pernyataan



Aslam asy'ari
NIM. 105731116316

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H. And Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM. 1286 844

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Amir, S. Pd dan ibu Junaida yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibada dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Andi Jam'an SE**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.CA.CSP**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Dr. H. Andi Jam'an., SE., M.Si**, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu **Muttiarni., SE., M.Si** selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan membantu dalam penyusunan Skripsi Hingga Ujian Skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dan banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan hingga akhir.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassa.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fi Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, Agustus 2022

Aslam Asy'ari



ABSTRAK

Aslam Asy'ari, Tahun 2022 "Analisis Implementasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang". Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Jam'an dan Pembimbing II Muttiarni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan rumus : Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah Baik dalam mengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 90% yaitu 98,79%. Sedangkan Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,255%. dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pendapatan Asli Daerah sebesar 112,125%.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan.*

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Analisis Laporan Keuangan	6
B. Analisis Kinerja Keuangan	8
C. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)	14
D. Rasio Keuangan Daerah	23
E. Tinjauan Empiris	28
F. Kerangka Konsep	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan sumber data	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Definisi Operasional dan Pengukuran	33
D. Populasi dan Sampel	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Jenis dan sumber data	36
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penilaian Efektivitas	26
Tabel 4.1	Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerahbadan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab Enrekang	46
Tabel 4.2	Rasio Efektivitas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	47
Tabel 4.3	Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerahbadan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab Enrekang	48
Tabel 4.4	Rasio Pertumbuhan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	50

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKD.....	38
Gambar 4.2	Rasio efektifitas BPK	48
Gambar 4.3	Rasi pertumbuhan BPKD	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Tinjauan Empiris
2. Laporan APB Daerah 2019
3. Laporan APB Daerah 2020
4. Laporan APB Daerah 2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut memerlukan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab

Secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan Undang-Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya. pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan

berkesinambungan. Apabila pemerintah telah mampu mengelola potensi daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal maka pemerintah telah dianggap mampu untuk menjalankan kewajiban. Kinerja keuangan pemerintah juga daerah dapat dilihat dari keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam mengukur kemampuannya untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Keberhasilan ini dilihat dari ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih kecil dan lebih besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam periode waktu tertentu.

Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pemerintah daerah dalam berupaya meningkatkan kinerja keuangannya menggunakan konsep value for money yang dimana mengandung pengertian konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini menjadi tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dengan baik.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja.

Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Dasar yang dapat digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend atau tendensi dan analisis rasio. Maka penulis mengajukan judul sebagai berikut: **“Analisis Implementasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kinerja keuangan dengan melihat rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Enrekang selama tiga tahun terakhir (2019-2021) ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Berdasarkan masalah pokok yang ditemukan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

a) Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kab. Enrekang selama lima tahun terakhir (2019-2021).

b) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan mengenai laporan keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.
2. Sebagai bahan keputusan atau sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin memperdalam tentang laporan keuangan dalam kinerja keuangan dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat untuk beragam pihak yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian digunakan untuk memperdalam pengetahuan di bidang keuangan khususnya menganalisa Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kab. Enrekang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak manajemen, dapat memanfaatkan hasil penelitian

ini sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.

- b. Bagi pemerintah, dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan sebagai bahan evaluasi analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Terhadap Kinerja Perusahaan.
- c. Bagi peneliti, untuk memperdalam pengetahuan dibidang keuangan, terutama yang berkaitan dengan analisis keuangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian analisis keuangan

Analisis yang interpretasi laporan keuangan bagi mereka yang berkepentingan adalah perlu sebagai dasar pengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu tepat. Menurut Poltak Sinaga (2014 : 220) Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecendrungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Hery (2015 : 132), analisis laporan keuangan merupakan suatu proses dalam membedakan laporan keuangan ke dalam unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut yaitu dengan suatu tujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Menurut Harahap, S.S (2013 : 189), analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian yaitu : analisis dan laporan keuangan. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Bila digabungkan menjadi analisis laporan keuangan yang berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Pengertian analisis laporan keuangan pada umumnya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi dimasa yang akan mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antar unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ketahun untuk mengetahui arah perkembangannya.

Data keuangan perlu disusun dan disederhanakan kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian arah perkembangannya.

2. Metode dan tehnik analisis laporan keuangan

Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dapat dipergunakan beberapa metode dan tehnik analisis, alat untuk mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga diketahui perubahan dari masing-masing pos tersebut. Metode-metode analisis yang umum digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a. Analisis statis atau analisis vertical, dalam metode ini analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan pada suatu priode

atau suatu saat saja, tanpa mengetahui perkembangannya.

- b. Analisis dinamis atau analisis horizontal, atau disebut dengan analisis trend, metode ini menganalisis laporan keuangan dengan cara mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan juga perkembangan yang terjadi.
- c. Analisis rasio adalah suatu metode untuk mengetahui perubahan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

B. Analisis Kinerja Keuangan

1. Pengertian kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektifitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggung jawabkan. (Mangkunegara : 2002). Dapat diartikan juga kinerja merupakan hasil keberhasilan seorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi. Yang dilakukan oleh segala segmen, peringkat dan jabatan di suatu instansi ataupun organisasi.

Kinerja juga merupakan sebuah penilaian oleh atasan dalam menilai kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat dipakai dalam penilaian sebuah tingkah laku individu pada pelaksanaan tugasnya atau tingkah laku terhadap tanggungjawab tugas yang diberikan.

Menurut Mangkunegara (2013:67) istilah kinerja berawal dari kata *Job performance* atau *actual performance* yakni prestasi kerja atau kerja sesungguhnya. Dari seorang pegawai/karyawan, maka pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:63) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka.

Menurut Irham Fahmi (2014:226) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi* mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan. *Rating* tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawab dengan

hasil seperti yang diharapkan, melalui perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara dalam Mulyadi (2015:63) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah :

a. Faktor kemampuan

Secara psikologi, kemampuan (*abilty*) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowledge + skill*). Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mengerjakan kerja maksimal.

b. Faktor Motivasi

Motivasi diartikan suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) dilingkungan organisasinya. Mereka bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi, sebaliknya jika mereka bersikap negative terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain : hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kbijaksanaan pimpinan, pla pemikiran kerja.

3. Metode Penilaian Kinerja

Terdapat beberapa metode dalam kinerja, sebagai diungkapkan oleh Widodo (2015:147) Yaitu :

- a. *Rating Scales*. Menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja (*performance Factor*). Misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai.
- b. *Critical Incidents*. Metode ini penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif (*high favorable*) dan perilaku kerja yang sangat negative selama periode penilaian
- c. *Essay*. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku eksterm dan tugas-tugas karyawan dari pada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari kehari. Penilaian ini sangat tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai.
- d. *Work Standart*. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan.
- e. *Rangking*. Penilaian menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan dipaling bawah.
- f. *Forced Distribution*. Penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja kedalam sejumlah kategori yang serupah dengan sebuah distribusi frekuensi Normal.

- g. *Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS)*. Evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya penilaian pelayanan pelanggan.

4. Kinerja Keuangan Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

Sedangkan Menurut Wachid (2014) "Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah". Kinerja keuangan pemerintah daerah ini dinilai apakah sesuai dengan target. Salah satu kinerja keuangan daerah adalah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu dinilai apakah pemerintah daerah telah menggali potensi daerah masing-masing untuk PAD yang optimum. Karena semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar pula kemampuan daerah

dalam menjalankan otonomi daerah. Namun, masing-masing daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan PAD terutama bagi kabupaten/kota yang belum lama berdiri. Tentunya tidak mudah bagi pemerintah kabupaten/kota tersebut menjalankan otonomi daerahnya.

Kemampuan Pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

5. Manfaat pengukuran kinerja

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
- c. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi

pada khususnya.

- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan bank pada suatu periode tertentu.

C. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

1. Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran. (Halim dan Kusufi : 2014).

Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (grondslog) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d) Periode anggaran, biasanya satu tahun.

APBD dalam pemerintah daerah berguna sebagai rencana perkiraan tinggi biaya pemasukkan dan pengeluaran anggaran dalam kegiatan dan proyek dalam periode anggaran satu tahun. Dimana didalam APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Rencana, jenis, dan bentuk proyek dalam bentuk angka maupun uraian dalam satu periode.
- b) Batas minimal target dan batas maksimal target pendanaan maupun pengeluaran aktivitas.

2. Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- b) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- d) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.

- e) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- f) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- g) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.
- h) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- i) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
- j) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

3. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain:

1) Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2) Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. a) Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Penganggaran Pendapatan.

- a) Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
 - 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.
- b) Dana Perimbangan
 - 1) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
 - 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
 - 3) Penganggaran Dana Otonomi Khusus.
 - 4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID).
 - 5) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - 6) Penganggaran Dana Transfer lainnya.

- 7) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.
- 8) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- 9) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 10) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian

pendapatan dimaksud.

11) Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, Objek dan rincian Objek pendapatan Dana Darurat.

2. Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

a. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa, merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,

cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

3. Belanja Modal, merupakan belanja untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

4. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Belanja Bunga. merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c) Belanja Subsidi, merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu

agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja. Sedangkan Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e) Belanja Bagi Hasil Pajak, merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f) Belanja Bantuan Keuangan, merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.
- g) Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

D. Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Abdul Halim (2012: 4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor. Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

2. Rasio Efektifitas

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2014:267) yaitu :

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Rahardjo (2011:170) dalam jurnal Mega Oktavia Ropa (2016:741) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Faud (2016:140) mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Rigel Nurul Fathah (2017:36) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektivitas Persentase	Efektivitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% -100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

Sumber : *Mohammad Mahsun (2016:130)*

Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan).

Menurut Mahmudi (2010:143) dalam jurnal (Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra, 2016:1779), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio efektivitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

3. Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2013:116) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan (*growth ratio*),

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Menurut Arief Sugiono (2009:68) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri.

Menurut Welio Wonda (2016:198), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

Arthaingan H. Mutiha (2016:110) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014, Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi ekonominya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami peningkatan.

E. Tinjauan Empiris

Beberapa penulis karya ilmiah sebagai berikut

Ritno H. Rondonuwu, DKK (2015) tentang Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, yang menggunakan metode analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efisiensi dan efektivitas dengan hasil penelitian Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah.

Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2012) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012, yang menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dengan hasil penelitian Secara keseluruhan rasio pertumbuhan tahun 2007-2012 mencapai nilai rata-rata 34,77 % dan dikategorikan kurang baik karena persentase rasio selama 6

tahun masih mengalami naik turun meskipun pada tahun 2011 dan 2012 sudah dikategorikan meningkat.

Mega Oktavia Ropa (2016) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang memakai metode deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik.

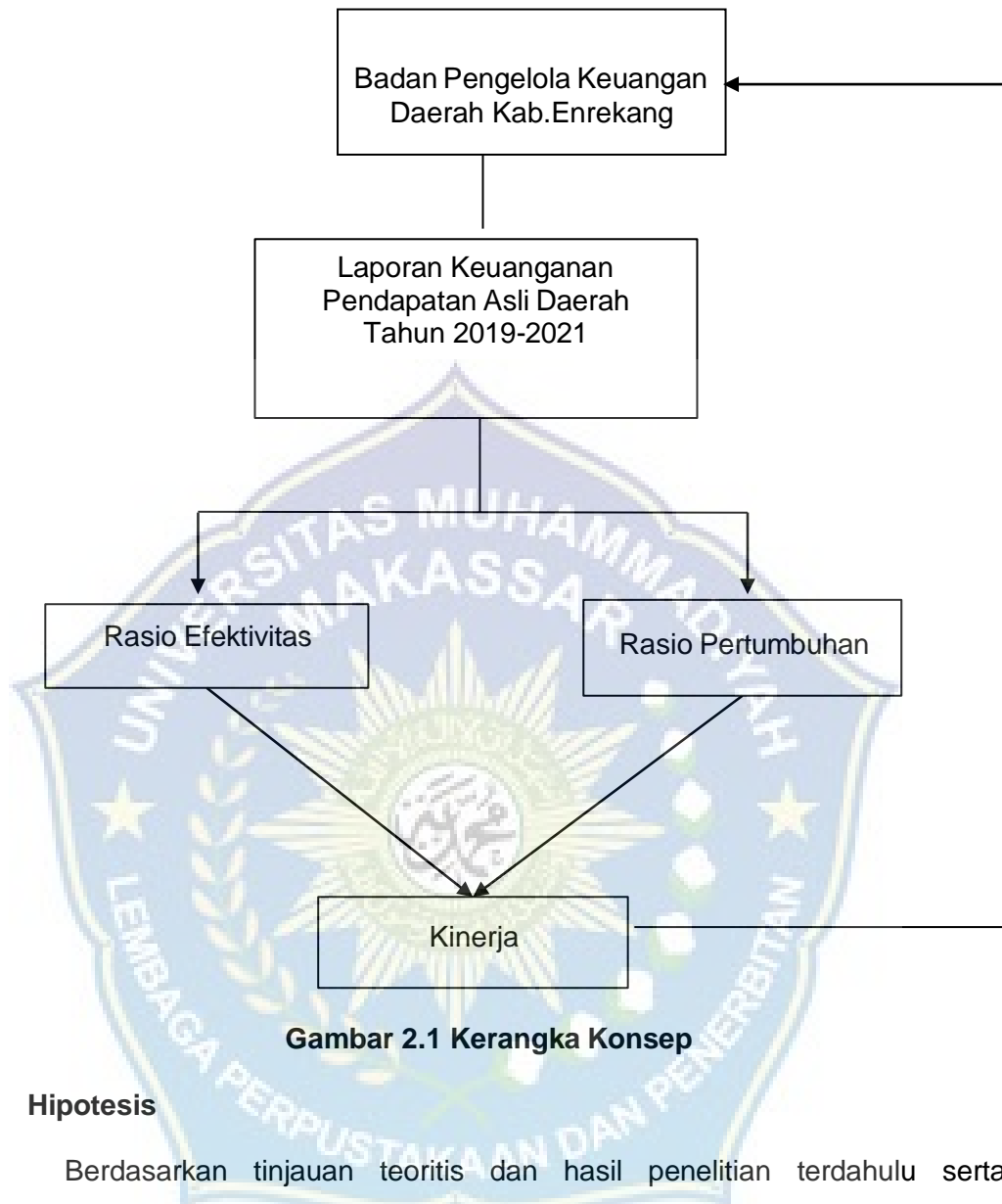
Erna Rahmawati dan I Wayan Putra (2016) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012 yang menggunakan metode Kuantitatif dan Kualitatif dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 tergolong ekonomis.

Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2014) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012 yang memakai metode deskriptif dengan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

F. Kerangka Konsep

Analisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah perlu adanya rasio keuangan sebagai acuan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam menganalisis kinerja keuangan, ada dua rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Dengan melihat hasil rasio tersebut dapat diketahui kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

G. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil penelitian terdahulu serta kerangka pikir yang telah diuraikan maka hipotesis yang dapat peneliti ajukan yaitu:

1. Diduga kinerja keuangan BPKD Kabupaten Enrekang Tahun Periode 2019-2021 berpengaruh signifikan terhadap Badan Pengelolaan Keuangan.
2. Diduga gambaran kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap Badan Pengelolaan Keuangan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang menunggang dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan Daerah.

Menurut Sugiyono (2017:8), Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Sumber data

Sumber data yang akan menjadi analisis dalam tulisan ini adalah data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Enrekang yang berhubung dengan anggaran dan realisasi daerah.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kabupaten Enrekang Alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan daerah asal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penulis juga ingin mengetahui seberapa baik kinerja keuangan Daerah pada Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian dan penulisan dilakukan selama 2 (dua) bulan, mulai bulan Juni-Juli 2022.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi Operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Enrekang dan Pengukurannya sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan). Rasio evektifitas menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan

Menurut Welio Wonda (2016:198), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Alasan Peneliti memilih Rasio efektivitas dan Rasio Pertumbuhan karena dengan menggunakan kedua rasio tersebut pemerintah dengan mudah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah atau yang dianggarkan sebelumnya sedangkan Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah Daerah telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja keuangan yaitu menganalisis hasil perhitungan dari rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2017:90) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

(BPKD) kab. Enrekang

2. Sampel

Menurut Sugiono (2017:81) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu penulis mengambil sampel selama tiga tahun terakhir (2019 - 2021).

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.



Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen yaitu dengan mengcopy file laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019-2021 dan profil kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Enrekang. Selain teknik dokumen, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugyono, 2017:147). Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai berikut

- a) Menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan membuat tabel,
- b) Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan atau dengan melihat grafiknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka memperlancar otonomi daerah di Kabupaten Enrekang maka Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan kewenangan membentuk beberapa lembaga Pemerintahan Kabupaten Enrekang sesuai dengan kebutuhannya.

Salah satu Lembaga Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah antara lain adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang yang pembentukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Enrekang, lembaga ini berkedudukan sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Kabupaten Enrekang dituntut adanya pengelolaan keuangan daerah lebih maksimal sehingga diperlukan menyusun rencana strategi dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal.

Namun dengan perkembangan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang maka DPKAD dibagian asset pada Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah digabung pada Sekretariat Daerah sehingga diubah menjadi BPKD (Badan

Pengelola Keuangan Daerah) sampai sekarang.

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

a) Visi :

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparansi dan akuntabel untuk gerakan membangun Enrekang maju, aman dan sejahtera.

b) Misi :

- a. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
- b. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.



3. Struktur Organisasi dan *job description*

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Enrekang



Gambar Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Job Description

1. Kepala BPKD

Sebagai penentu kebijakan yang ada di perusahaan dan membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris

Mengkoordinir pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kantor di lingkungan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), seperti kepala sub

bagian perencanaan, kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian.

a. Kepala Sub. Perencanaan yang mempunyai tugas yaitu :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. Menyusun dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), RENSTRA (Rencana Strategi), Renja (Rencana Kerja), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dan laporan pelaksana kerja lainnya;
3. Melaksanakan monev program dan anggaran;
4. Menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran secara berkala; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Sub. Keuangan, yang mempunyai tugas yaitu :

1. Menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran)
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan, pembayaran dan penggajian pegawai;
3. Melaksanakan tata laksana dan pengolahan data keuangan;
4. Melaksanakan verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
5. Melaksanakan pengendalian, pelaporan keuangan dan pengawasan pembukuan perbendaharaan;
6. Menyiapkan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan PPK

(Penjabat Pembuatan Komitmen);

7. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Sub. Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas yaitu:

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga;
3. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara);
5. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, dokumentasi, ketatalaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai;
6. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, serta pemberhentian dan pensiun;
7. Melaksanakan pengembangan karier pegawai, pembinaan jabatan fungsional, serta pengelolaan data dan arsip kepegawaian; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Bidang Anggaran

Membantu kepala badan dalam melaksanakan penganggaran daerah dan mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan program dan kegiatan SKPD sesuai tugas. Mengawasi kepala sub bidang penyusunan APBD dan kepala sub bidang otorisasi anggaran.

- a. Kepala Sub Bidang penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
 1. Merumuskan kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 2. Merumuskan kebijakan pelaksanaan APBD
 3. Menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan DPA (dewan Pertimbangan Agung),SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA(dokumen Pelaksana Anggaran SKPD)
 4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Sub Bidang otorisasi anggaran
 1. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD);
 2. Melakukan evaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 3. Menyiapkan arsip Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD); dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang pembendaharaan, menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembinaan pembendaharaan, mengusulkan penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta melakukan penagihan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab dan mengawasi kepala sub bidang belanja langsung dan kepala sub bidang belanja tidak langsung pembiayaan dan pengelolaan Kas Daerah.

a. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung.

1. Menyusun dan menyiapkan data anggaran belanja langsung;
2. Melakukan evaluasi data anggaran belanja langsung sebagai bahan penyusunan APBD dan APBD-P;
3. Menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD- P untuk belanja langsung; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Sub Bidang belanja tidak langsung pembiayaan dan pengelolaan usaha

1. Menyusun dan menyiapkan data perencanaan anggaran belanja gaji, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan daerah;
2. Melakukan evaluasi belanja anggaran belanja gaji, belanja

bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan daerah sebagai bahan penyusunan APBD dan APBD-P.

3. Menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD-P untuk anggaran belanja gaji, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan ; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Verivikasi

mengawasi kepala sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan dan kepala sub bidang verifikasi pertanggung jawaban.

a. Kepala Sub Bidang Verivikasi Penatausahaan dan Keuangan

1. Melakukan konsolidasi penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
2. Melaksanakankonsolidasi penatausahaan meliputi pembukuan daftar barang pengguna dan daftar barang pengelola, melakukan inventarisasi serta menyusun laporan semester dan laporan tahunan Barang Milik Daerah; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang verivikasi sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban

1. Bertanggung jawab atas apa yang terjadi didalam bidang verivikasi;

2. Bertanggungjawab atas penyusunan laporan yang masuk dalam bidang verifikasi; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang verifikasi sesuai dengan tugasnya.

6. Kepala Bidang Akuntansi

Membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang akuntansi, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab dan mengawasi kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan dan kepala sub bidang neraca.

1. Kepala Sub Bidang Pembukaan dan Pelaporan

- a. Melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan pendapatan dan penerimaan pembiayaan ;
- b. Melakukan verifikasi pendapatan yang telah diterima dan rekonsiliasi dengan BUD;
- c. Melakukan konsolidasi Laporan Realisasi Pendapatan dengan SKPD; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugasnya.

2. Kepala Sub Bidang Neraca

- a) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program bidang akuntansi;
- b) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi pemerintah serta regulasi keuangan lainnya;
- c) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Hasil penelitian

Analisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Enrekang dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDaerah). Dari data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2019-2021). Adapun hasil dari analisis rasio tersebut sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan). Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Enrekang

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)
2019	5,800,111,000	7,000,965,000
2020	7,500,969,541	7,965,000,000
2021	10,741,173,000	8,999,000,000

Sumber : APB Daerah kabupaten Enrekang (Data diolah, 2022)

Perhitungan Rasio Efektivitas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019-2021, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio 2019} = \frac{\text{Rp. 5.800.111.000}}{\text{Rp. 7.000.965.000}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio 2020} = \frac{\text{Rp.7.500.969.541}}{\text{Rp. 7.965.000.000}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio 2021} = \frac{\text{Rp.10.741.173.000}}{\text{Rp. 8.999.000.000}} \times 100 \%$$

Tabel 4.2

Rasio Efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Enrekang

Tahun	Realisasi ADD (Rp)	Anggaran ADD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2019	5,800,111,000	7,000,965,000	82,84%	Cukup Efektif
2020	7,500,969,541	7,965,000,000	94,17%	Efektif
2021	10,741,173,000	8,999,000,000	119,36%	Sangat Efektif

Sumber : APBDaerah kabupaten Enrekang (Data diolah, 2022)

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp. 7,000,965,000. Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik menjadi Rp. 7,965,000,000. Kemudian pada tahun 2021 anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali naik menjadi Rp. 8,999,000,000.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5,800,111,000. Pada tahun 2020 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan menjadi Rp. 7,500,969,541. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar Rp. 10,741,173,000.

Gambar 4.2

Rasio Efektivitas Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Enrekang



Sumber : dari tabel 4.2 (diolah kembali : 2022)

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Efektivitas dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 sebesar 82,84% tahun 2020 sebesar 94,17% dan tahun 2021 sebesar 119,36%. Efektivitas kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang untuk tahun 2019 dan 2022 dikategorikan Efektif. Karena nilai yang diperoleh diatas 80%.

2. Rasio Pertumbuhan

Menurut Welio Wonda (2016:198), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

<p>Rasio Pertumbuhan Pendapatan PAD</p> $= \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$ <p>Rasio Pertumbuhan Belanja PAD</p> $= \frac{\text{Realisasi Belanja PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja PAD } X_{n-1}} \times 100\%$
--

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Tahun	Realisasi Pendapatan (PAD) (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
2019	5,800,111,000	26,268,107,842
2020	7,500,969,541	28,309,172,631
2021	10,741,173,000	89,590,117,666

Sumber : APB Daerah Kabupaten Enrekang (Data diolah, 2022)

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan PAD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019-21021, sebagai berikut :

<p>Rasio Pertumbuhan Pendapatan PAD</p> $= \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$
--

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. } 5.800.111.000 - \text{Rp. } 0}{\text{Rp. } 0} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. } 7.500.969.541 - \text{Rp. } 5.800.111.000}{\text{Rp. } 5.800.111.000} \times 100\% = 29,32\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. } 10.741.173.000 - \text{Rp. } 7.500.969.541}{\text{Rp. } 7.500.969.541} \times 100\% = 43,19\%$$

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja PAD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016-2019, sebagai berikut :

Rasio Pertumbuhan Belanja PAD $= \frac{\text{Realisasi Belanja PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja PAD } X_{n-1}} \times 100\%$
--

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. } 26.268.107.842 - \text{Rp. } 0}{\text{Rp. } 0} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. } 28.309.172.631 - \text{Rp. } 26.268.107.842}{\text{Rp. } 26.268.107.842} \times 100\% = 77\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. } 89.590.117.666 - \text{Rp. } 28.309.172.631}{\text{Rp. } 28.309.172.631} \times 100\% = 216,47\%$$

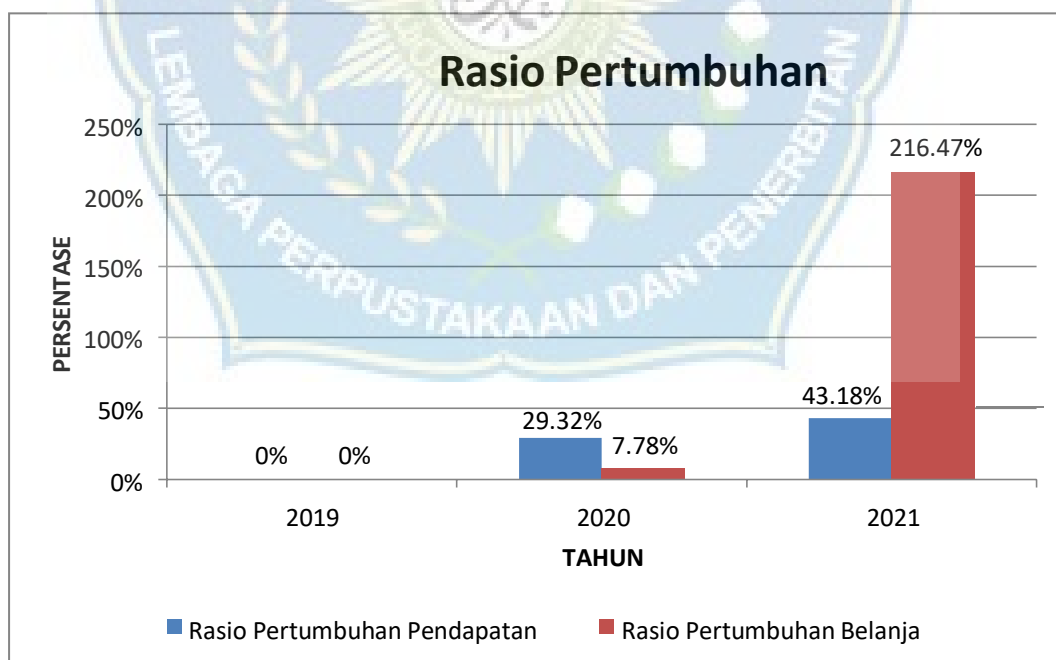
Tabel 4.4

**Rasio Pertumbuhan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Enrekang**

Tahun	Realisasi Pendapatan PAD (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan PAD (%)	Realisasi Belanja PAD (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja PAD (%)
2019	5,800,111,000	0%	26,268,107,842	0%
2020	7,500,969,541	29,32%	28,309,172,631	7,78%
2021	10,741,173,000	43,19%	89,590,117,666	216,47%

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5,800,111,000. naik menjadi Rp 7,500,969,541 pada tahun 2020. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 10,741,173,000.

Laporan keuangan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 Realisasi Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 26,268,107,842, naik menjadi Rp. 28,309,172,631 pada tahun 2020. Kemudian mengalami Kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 89,590,117,666.



Sumber : dari tabel 4.2 (diolah kembali : 2022)

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) keuangan Badan

Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2020 sebesar 29,32% mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu 43,19%.

3. Analisis kinerja keuangan

Menganalisis hasil perhitungan dari rasio efektif dan rasio pertumbuhan dengan melihat hasil rata-rata, dimana rasio efektivitas rata-rata efektivitasnya di atas 90% yaitu 98,79%. Dan rasio Pertumbuhan rata-rata Pertumbuhannya sebesar 36,255%.

C. Pembahasan

1. Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 90% yaitu 98,79%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tergolong sangat Baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ritno H. Rondonuwu, DKK (2015) yang melakukan penelitian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah. Sama dengan yang terjadi dalam penelitian ini, kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik atau efektif karena efektivitasnya yang terus meningkat tiap

tahunnya.

2. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2020 sebesar 29,32% mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu 43,19%.

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 yaitu sebesar 29,32% dan mengalami kenaikan pertumbuhan kembali di tahun 2021 sebesar 43,19%

Laporan keuangan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 Realisasi Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 26,268,107,842, naik menjadi Rp. 28,309,172,631 pada tahun 2020. Kemudian mengalami Kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 89,590,117,666.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 sebesar 7,78% dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 216,47%.

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Pertumbuhan Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Puncak pertumbuhan berada pada

tahun 2021 yaitu sebesar 216,47% sementara itu terjadi penurunan pertumbuhan di tahun 2020 yaitu sebesar 7,78%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tumbuh secara positif dari tahun 2019-2021 karena rata-rata Pertumbuhannya sebesar 36,255%. Hasil perhitungan pada Rasio Pertumbuhan belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kinerja Keuangan Pertumbuhan Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang juga mengalami pertumbuhan secara positif dari tahun 2019-2021 sebesar 112,125%.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Masita Machmud, Dkk (2017) yang melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Utara Memiliki kinerja Keuangan Daerah dikategorikan kurang baik karena persentase rasio selama 6 tahun masih mengalami naik turun meskipun pada tahun 2015 dan 2016 sudah dikategorikan meningkat. Berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan pertumbuhan positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2019-2021 sudah sangat Baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas rata-rata efektivitasnya dari tahun 2019- 2021 di atas 90% yaitu 98,79%.Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2019 sebesar 82,84%, tahun 2020 sebesar 94,17%, dan tahun 2021 sebesar 119,36%. dikategorikan Efektif.
2. Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019-2022 sebesar 112,125%. lebih bagus bila dibandingkan dengan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sebesar 36,255%. Rincian Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut : tahun 2020 sebesar 29,32% dan tahun 2021 sebesar 43,19%. Rincian Rasio Pertumbuhan Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut : tahun 2020 sebesar 7,78%, dan tahun 2021 sebesar 216,47%. Menunjukkan pertumbuhan positif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Enrekang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Bagi peneliti
Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih akurat. Selain itu diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2012. *Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- _____ 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Eko Widodo,Suparno.2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR
- Fahmi, Irham. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Alfabeta
- Harahap, S. S. 2013. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- _____ 2012. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- _____ 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat
- Hery.2015. *Analisis Laporan Keuangan: Pendekatan Rasio Keuangan*. Yogyakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Kasmir. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana: Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mohamad Mahsun. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- _____ 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Muliyadi. 2015. *Akuntansi Biaya, Edisi 5*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mutiha, Arthaingan H. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014*. *Jurnal Vokasi Indonesia*. Vol.4 No.2.
- Nurhayati. 2015. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol.4 No.1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan: Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015: Jakarta.

Ritno H. Rondonuwu. Dkk.2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Vol 3 No 4.

Ropa, Mega Oktavia. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.2.

Sinaga, Poltak. 2014. *Teori portofolio dan analisis investasi teori dan aplikasi*.

Medan : Penerbit Mitra.

Sugiono, Arief. 2009. *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*. PT Grasindo, anggota Ikapi: Jakarta.

Wonda, Welio. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.3.





Lampiran 1 Tinjauan Empiris

Adapun beberapa penulis karya ilmiah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Ritno H. Rondonuwu, DKK (2015)	Analisis Efisiensi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.	analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efisiensi dan efektivitas	Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah.
2	Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas	ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2007-2012	Deskriptif Kuantitatif	Secara keseluruhan rasio pertumbuhan tahun 2007-2012 mencapai nilai rata-rata 34,77 % dan dikategorikan Kurang baik karena persentase rasio selama 6 tahun masih mengalami naik turun meskipun pada tahun 2011 dan 2012 sudah dikategorikan meningkat.
3	Mega Oktavia	Analisis Kinerja	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
	Ropa (2016)	Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan		dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik.
4	Erna Rahmawati I dan I Wayan Putra (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012	Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa tingkat Kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD Dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat Pertumbuhan PAD Menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				<p>pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 tergolong ekonomis.</p>
5	Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012	Deskriptif	<p>Hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>

LAMPIRAN 2

LAPORAN KEUANGAN BPKD 2019
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / KURANG
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,000,965,000	5,800,111,000	1,200,854,000
3	Pendapatan pajak daerah	17,737,000,000	16,147,403,707	1,589,596,293
4	Pendapatan retribusi daerah	11,070,000,000	10,061,500,000	1,008,500,000
5	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0	0	0
6	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0	0	0
7	JUMLAH PENDAPATAN	35,807,965,000	32,009,014,707	3,798,950,293
8	BELANJA			
9	BELANJA OPERASI			
10	belanja pegawai	12,702,544,048	11,523,415,053	1,179,128,995
11	belanja bunga	11,539,456,765.00	9,823,959,087	1,715,497,678.00
12	belanja subsidi	0	0	0
13	belanja hibah	0	0	0
14	belanja bansos	4,997,000,000	0	4,997,000,000
15	jumlah belanja operasi	29,239,000,813	21,347,374,140	7,891,626,673
16	BELANJA MODAL			
17	belanja tanah	0	0	0
18	belanja peralatan dan mesin	2,741,173,000	2,390,366,851	350,806,149
19	belanja gedung dan bangunan	75,000,000	70,000,000	5,000,000
20	belanja jalan, irigasi, dan jaringan	0	0	0
21	belanja aset tetap lainnya	0	0	0
22	belanja aset lainnya	0	0	0
23	jumlah belanja modal	2,816,173,000	2,460,366,851	355,806,149
24				
25	JUMLAH BELANJA	34,871,346,813	26,268,107,842	8,603,238,971
	SURPLUS/DEVISIT	936,618 187	5,740,906,865	-4,804 288,678

Mengetahui
Kepala DPKAD

Drs. A. ULUNG TIRO.R.MM

LAMPIRAN 3

LAPORAN KEUANGAN BPKD 2020
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,965,000,000	7,500,969,541	464,030,459
3	Pendapatan Pajak Daerah	17,500,000,000	17,000,000,000	500,000,000
4	Pendapatan Distribusi Daerah	10,095,000,000	9,500,000,000	595,000,000
5	Pendapatan Hasil Pengelolah kekayaan	0	0	0
6	Lain-lain PAD yang sah	0	0	0
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	0	0
8	JUMLAH PENDAPATAN	35,560,000,000	34,000,969,541	1,559,030,459
9	BELANJA			
10	BELANJA OPERASI			
11	Belanja Pegawai	8,910,354,400	9,109,914,176	-199,559,776
12	Belanja Barang	6,270,496,750	6,139,845,698	130,651,052
13	Bunga	0	0	0
14	Subsidi	928,656,000	0	928,656,000
15	Hibah	15,330,100,000	11,254,481,757	4,075,618,243
16	Bantuan Sosial	745,000,000	0	745,000,000
17	Jumlah Belanja Operasi	32,184,607,150	26,504,241,631	5,680,365,519
18				
19	BELANJA MODAL			
20	Belanja Tanah	0	0	
21	Belanja Gedung Dan bangunan	945,450,000	902,465,500	42,984,500
22	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	0	0	0
23	Belanja aset tetap lainnya	0	0	0
24	Belanja aset lainnya	0	0	0
25	Jumlah belanja Modal	945,450,000	902,465,500	42,984,500
26				
27	Jumlah Belanja SURPLUS/DEVISI	34,075,507,150	28,309,172,631	5,766,334,519
		1,484,492,850	5,691,796,910	-4,207,304,060

Mengetahui
Kepala BPKD

Drs. A. ULUNG TIRO.R.MM

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	PENDAPATAN LRA	0	0	0
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	8,999,000,000	10,741,173,000	-1,742,173,000
3	Pendapatan pajak daerah-LRA	0	0	0
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0	0	0
5	Pendapatan hasil pengelola kekayaan dana daera	15,100,000,000	13,596,908,237	1,503,091,763
6	yang dipisahkan -LRA	0	0	0
7	Lain-lain PAD yang sah -LRA	60,133,000,000	4,567,959,159	55,565,040,841
8	PENDAPATAN TRANSFER LRA	24,099,000,000	24,000,000,000	99,000,000
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dana	766,366,943,085	778,355,773,232	-11,988,830,147
10	Perimbangan LRA			0
11	Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LRA	97,769,717,000	97,769,717,000	0
12	Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya LRA	36,017,000,000	35,355,461,082	661,538,918
13	Bantuan Keuangan - LRA	5,134,490,600	4,756,258,970	378,231,630
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34,000,000,000	31,748,197,986	2,251,802,014
15	Pendapatan Hibah	34,000,000,000	31,748,197,986	2,251,802,014
16	Dana Darurat	0	0	0
17	Pendapatan Lainnya	0	0	0
18	JUMLAH PENDAPATAN	1,081,619,150,685	1,032,639,646,652	48,979,504,033
19				
20	BELANJA			
21	BELANJA OPERASI	49,505,799,674	44,564,659,217	4,941,140,457
22	Belanja pegawai	11,494,270,301	11,405,385,551	88,884,750
23	Belanja barang dan jasa	4,452,129,373	4,403,304,125	48,825,248
24	Belanja Bunga	0	0	0
25	Belanja Subsidi	0	0	0
26	Belanja Hibah	0	0	0

27	Belanja Bantuan Sosial	33,049,400,000	28,635,969,541	4,413,430,459
28	Belanja Bagi Hasil Pajak pajak dan retribusi	500,000 000	120,000 000	380,000 000
29	BELANJA MODAL	10,000,000	0,00	10,000,000
30	Belanja modal tanah	0	0	0
31	Belanja modal peralatan dan mesin	0	0	0
32	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	0	0	0
33	Belanja Modal Jalan , irigasi dan jaringan	0	0	0
34	Belanja Modal Aset lainnya	0	0	0
35	Belanja Modal Operasional BLUD	0	0	0
36	BELANJA TAK TERDUGA	750,000,000	230,399,616	519,600,384
37	Belanja tak terduga	750,000,000	230,399,616	519,600,384
38	JUMLAH BELANJA	100,511,599,348	89,590,117,666	10,921,481,682
39				
40	TRANSFER			
41	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0	0	0
42	Transfer bafi hasil daerah	0	0	0
43	Transfer bagi hasil lainnya	0	0	0
44	TRANSFER BAGIAN KEUANGAN	155,280,547,100	155,283,276,917	-2,729,817
45	Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	0	0	0
46	Transfer bantuan keuangan ke Desa	154,631,994,300	154,624,724,117	7,270,183
47	Transfer bantuan keuangan lainnya	648,552,800	648,552,800	0
48	transfer dana otonim khusus	0	0	0
49	JUMLAH TRANSFER	155,280,547,100	155,273,276,917	
	SURPLUS/DEFISIT	926,338,603,585	877,366,369,735	48,972,233,850

BIOGRAFI PENULIS



Aslam asy'ari, Lahir pada tanggal 24 Maret 199 di kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Amir dan Junaida. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

Tempuh oleh penulis yaitu SD 118 Kotu, Kabupaten Enrekang lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP 3 Anggeraja Kabupaten Enrekang lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di SMA Negeri 1 Anggeraja Kabupaten Enrekang dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuam Alam dan lulus pada tahun 2016 dan penulis melanjutkan pendidikan di program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

